



Judul : Kehidupan beragama : 16 parlemen dunia lakukan dialog
Tanggal : Selasa, 20 Nopember 2012
Surat Kabar : Suara Karya
Halaman : 3

KEHIDUPAN BERAGAMA

16 Parlemen Dunia Lakukan Dialog

JAKARTA (Suara Karya): Anggota parlemen dari 16 negara di dunia akan bertemu guna membahas mengenai dialog antaragama di Bali, pada 21 - 24 November, kata Ketua DPR RI Marzuki Alie di Jakarta, kemarin.

"Mencuatnya konflik antarmanusia, yang muncul dengan latar belakang agama atau pun kebudayaan, memunculkan keprihatinan berbagai pihak, termasuk parlemen," katanya.

Hal tersebut menjadi dasar bagi para anggota parlemen di berbagai negara untuk bertemu dan menyeramakan pemahaman mengenai kehidupan beragama. Menurut dia, tindakan dan aksi yang dilakukan oleh petinggi elit dunia belum cukup untuk memengaruhi aksi negatif tersebut.

"Ini tidak hanya terkait dengan Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Seluruh negara harus memiliki kesepakatan mengenai pemahaman beragama, termasuk juga parlemen memiliki kesepahaman yang sama," jelasnya.

Penyelenggaraan "Parliamentary Event on Interfaith Dialogue" tersebut merupa-

kan permintaan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon, yang menginginkan agar parlemen Indonesia dapat meningkatkan peran aktifnya dalam hal toleransi antarumat beragama.

"Pertemuan di Bali tersebut juga menjawab permintaan Sekjen PBB, pada saat menerima kunjungan delegasi komisi I DPR RI pada 14 November lalu," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman di Jakarta, Senin.

Dalam acara tersebut akan hadir sejumlah tokoh intelektual agama nasional, antara lain Frans Magniz Suseno, Hidayat Nur Wahid dan Azyumardi Azra, selain juga anggota parlemen dari Jerman, Australia dan Tunisia.

Forum tersebut rencananya akan mempertemukan para anggota parlemen di dunia dan mendiskusikan sejumlah tema yang terkait dengan kerja sama antaragama dan antarkebudayaan.

Pada akhir kegiatan tersebut diharapkan akan terbentuk Deklarasi Bali mengenai peran parlemen dalam kerja sama antaragama dan antarkebudayaan di se-

jumlah negara.

Sementara itu, mengenai soal Hambalang, Marzuki akan bersikap netral terkait wacana penggunaan hak meminta keterangan kepada Pemerintah (interpelasi) mengenai kasus Hambalang.

"Saya netral saja, tidak mau menyatakan setuju atau tidak setuju. Kalau anggota sepakat dan memenuhi syarat untuk interpelasi, maka sebagai pimpinan akan melanjutkan," kata Marzuki di Jakarta, Senin.

Menurutnya, dalam menyepakati penggunaan hak bertanya mengenai kebijakan Pemerintah tersebut harus memenuhi mekanisme dan tata tertib peraturan yang berlaku.

"Ada peraturan yang memenuhi ketentuan. Kalau itu dipenuhi, posisi pimpinan hanya menindaklanjuti lalu akan disampaikan pada paripurna," lanjutnya.

Penggunaan hak interpelasi tersebut, menurut Marzuki, tidak bisa dinilai apakah itu tepat atau tidak karena akan menimbulkan asumsi berbeda. "Kalau disepakati ya silakan, kalau tidak ya sudah," katanya.

(* / Kentos)